



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

FORMULIR PENDAFTARAN
WAJIB PAJAK REKLAME

Kepada,
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung
Di -
Bandung

PERHATIAN:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dalam huruf CETAK
2. Diberi \checkmark pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan;
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

DIISI OLEH SELURUH WAJIB PAJAK BADAN

Nama Badan/Merk Usaha :

Alamat : Jalan :
RT/RW :
Nomor :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kode Pos :
Nomor Telepon :
Kode Pos :

Surat Izin yang dimiliki (Photo copy surat izin harap dilampirkan)

Surat Izin Tempat Usaha No Tgl
Surat izin No Tgl
Surat izin No Tgl

Surat Pernyataan Kegiatan Usaha dari Pengelola/Pemilik Usaha

Bidang Usaha (Harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)

.....
.....

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama :

Jabatan :

Alamat : Jalan :

RT/RW :

Nomor :

Kelurahan :

Kecamatan :

Nomor Telepon :

Kode Pos :

:

Nama Jelas :
Tanda tangan

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
Diterima tanggal
Nama jelas/NIP

DIISI OLEH PETUGAS PENCATATAN DATA
NPWPD yang diberikan

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Jelas/NIP :
Tanda tangan



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan
Wastukencana No. 2
Telp. 022 4235052 Bandung

FORMULIR PENDATAAN No
PAJAK REKLAME Masa Pajak :.....
Tahun Pajak:.....

Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telp/Fax
 Kelurahan
 Kecamatan
 NPWPD :
 Jenis Usaha :
 Cara Pemasangan :
 Lokasi Pemasangan :

No	Jenis Reklame	Satuan Ukuran Reklame	Tinggi /M ²	Fungsi Ruang	Sudut Pandang	Fungsi Jalan	Jumlah	Ket
1	Reklame Permanen a. Billboard/papan b. Megatron c. Videotron d. LED (light Emithing Diode) e. Running Tex f. Neon Box							
2	Reklame tembok/dinding (Mural dan grafiti)							
3	Reklame kain/layar a. Spanduk,umbul-umbul,bandir. b. Banner, baligho							
4	Reklame melekat							
5	Reklame selebaran (brosur)							
6	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan							
7	Reklame udara							
8	Reklame film/slide							
9	Reklame peragaan a. Permanen b. Tidak permanen							
10	Lain-lain							

PERYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya beritahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Nama Petugas :
 NIP :
 Tanda Tangan :

Bandung, 20 ...
 Wajib Pajak
 Penanggung Jawab/Kuasa
 Perusahaan



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Wastukencana No. 2
Telp. 022 4235052 Bandung

Nomor Formulir

--	--	--	--	--	--	--	--

TANDA TERIMA

Nama :

Alamat :

Telah menerima :

.....
.....
.....

Bandung,.....

Yang Menerima

(.....)



Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

Nama :
 Alamat :
 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPD) :
 Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Uraian Pajak Reklame	Jumlah (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	

Dengan huruf :

PERHATIAN :

1. Jumlah Ketetapan ini sesuai dengan Nota Pengantar Perhitungan Pajak Nomor
2. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menerima Bukti pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah.
3. Apabila SKPD ini tidak atau kurang bayar setelah lewat waktu paling lama 15 hari Kalender setelah SKPD ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per- bulan.

Bandung, Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... Gunting disini

		No. SKPD
TANDA TERIMA		
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
		Bandung, Tahun
		Yang Menerima
(.....)		



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Wastukencana
 No. 2
 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SKPDN
 (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

No. Urut

Nama :
 Alamat :

NPWPD :

I. Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain di atas pelaksanaan kewajiban :

Ayat Pajak :

Nama Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. |
| 2. Pajak yang terutang | Rp. |
| 3. Kredit Pajak | |
| a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya | Rp. |
| b. Setoran yang dilakukan | Rp. |
| c. Lain-lain | Rp. |
| d. STP (Pokok) | Rp. |
| e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c) | Rp. |
| 4. Jumlah yang harus dibayar (2-3e) | Rp. NIHIL |

Bandung,Tahun
 a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH
 KOTA BANDUNG

.....
 NIP.

..... **Gunting disini**

	No. SKPDN
	TANDA TERIMA
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
	Bandung, Tahun Yang Menerima
	(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Wastukencana
 No.2
 Telp. (022) 4235052 -Bandung

SSPD
 (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)
 Tahun

Nama :
 Alamat :

NPWPD :

(Menyetor berdasarkan *) SKPD STPD Lain-lain
 SKPDKB K Pembetulan
 SKPDKBT K Keberatan
 : Masa Pajak Tahun No. Urut

No	Ayat	Jenis Pajak	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Pajak			

Dengan huruf

Ruang untuk Teraan Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh; Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Bandung, Tahun Penyetor (.....)
---	---	--

Beri tanda v pada kotak sesuai dengan yang dimiliki.



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KESATU
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Pertama ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Kedua dapat disertai dengan penempelan media peringatan pada objek pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD : □ □ □□□□□□□□ □□ □□

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KEDUA
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Kedua ini.

Setelah batas waktu tersebut, penerbitan Surat Teguran Ketiga dapat disertai penerbitan SKPDKB secara jabatan dan publikasi di media massa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

NPWPD :

Kepada Yth,
.....
.....
di

SURAT TEGURAN KETIGA
Nomor :

Menurut pembukuan kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)

Dengan Huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran Ketiga ini.

Setelah batas waktu tersebut, tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT - PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Nama Wajib Pajak /PenanggungPajak :
NPWPD :
Alamat :

Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
Jumlah				

Dengan ini :

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Catatan

- Jumlah Tunggakan tersebut belum termasuk denda

BERITA ACARA
Penyampaian Surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulantahun
..... atas permintaan Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah Kota Bandung yang berkedudukan di Jalan Wastukencana No.
2 Bandung, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota
Bandung bertempat tinggal di berdasarkan
Surat Perintah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor
..... tanggal

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 x 24
jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas Daerah
Sebesar Rp. (.....)

selanjutnya dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka
harta bendanya baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak
bergerak, akan disita dan dijual di muka umum dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak,denda,bunga dan biaya-biaya yang berhubungan
dengan pelaksanaan penagihan ini.

Saya, Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak dan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung
Pajak, di tempat tinggal/kedudukan Wajib pajak/Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
Bertempat tinggal di
Disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa

Juru Sita Pajak Daerah,

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa wajib pajak/penanggung pajak

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :

Telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor
TanggalHingga saat ini belum melunasi jumlah pajak
yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan:

Kepada: Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 10 hari kerja setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambathari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
Nomor

Pada hari ini tanggal bulan tahun
atas kekuatan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung Nomor tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini memilih domisili di jl..... Berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor..... yang telah diberitahukan dengan resmi kepada wajib pajak daerah bertempat tinggal di jl. Dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (Dua puluh satu) tahun yang telah dewasa dan dapat dipercaya yaitu:

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

Telah datang di rumah/perusahaan wajib pajak/penanggung pajak:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

NPWPD :

Alamat :
.....

Untuk melaksanakan perintah penyitaan dimaksud atas barang-barang milik wajib pajak/penanggung pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini:

Jenis Pajak	Jumlah pajak yang masih harus dibayar
.....
.....

Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincisn barang-barang yang telah disita sebagai berikut:

Jenis Barang Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.
Jenis Barang Tidak Bergerak	Terletak di	Taksiran Harga
.....	Rp.
.....	Rp.
.....	Rp.

2. Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena :
.....
.....

Wajib Pajak/Penanggung Pajak Juru Sita
.....

Saksi - Saksi

1.
2.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 - Bandung

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang
Barang-barang Sitaan atas di
tunggakan Pajak

Bandung,
Kepada Yth,
.....
.....
.....

Bersama ini diharapkan Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak seperti yang terlampir dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah dilaksanakan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

NPWPD :

Bertempat tinggal di
yang telah menunggak pajak sebesar Rp.
(.....) kepada Pemerintah Kota Bandung
untuk dilelang di muka umum.

Diharapkan lelang dimaksud dapat dilaksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian pelelangan dapat diberitahukan seminggu sebelumnya.

Lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi utang pajak dimaksud ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp
(.....)

Demikian atas bantuannya, disampaikan terima kasih.

Bandung, Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Bandung,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Keberatan Pajak

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kota Bandung

di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Keberatan Pajak atas
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun.....

Jumlah Rp.....

Dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTABANDUNG

Nomor:

**TENTANG KEBERATAN PAJAK
REKLAME**

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Keberatan Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung :
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/Ditambah dengan : Rp.
jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.
Dengan huruf.....

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG,

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 - 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG - 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTABANDUNG

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Keberatan Pajak Nomor
 Tanggal
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD :

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Keberatan Pajak.

KEDUA : Surat Permohonan Keberatan Pajak Reklame
 Nomor
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD.....
 Berhubung :

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTABANDUNG

Nomor:

TENTANG

PEMBATALAN PAJAKREKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
 Nomor
 Tanggal
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD :

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*)
 Nomor
 Tanggal
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD
 Berhubung :

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTABANDUNG

Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Penolakan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD.....
Berhubung :

- KETIGA** : Mematuhi pembayaran sesuai Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALI KOTA BANDUNG

(.....)

JALAN WASTUKANCANA NO. 02 TELEPON (022) 4232338 – 4207706 FAX (022) 4236150
BANDUNG – 402117 PROVINSI JAWA BARAT

Bandung,

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Pembetulan,
 Pembatalan, Pengurangan
 Ketetapan, dan Pengurangan atau
 Penghapusan Sanksi
 Administrasi Pajak Reklame.

Kepada Yth,
 Kepala Badan Pengelolaan
 Pendapatan Daerah
 Kota Bandung
 di
 BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
 pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama:

Nama/Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
 Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame
 yang terutang atas SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)

No

Bulan Tahun.....

Jumlah Rp.....

Dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
 Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG**

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
 Nomor
 Tanggal
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD :

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD*)
 Nomor
 Nama/Merk Usaha
 Alamat
 NPWPD

Berhubung

.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.
KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD.....

Nama Wajib Pajak / Penanggung
Pajak
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf.....
.....

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Nomor :

TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang
 Nomor
 Tanggal
 Atas Nama
 Alamat
 NPWPD :

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang..... ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penolakan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame.

KEDUA : Surat Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/STPD*)
 Nomor
 Nama/Merk Usaha
 Alamat
 NPWPD.....

Berhubung

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG

Nomor :

TENTANG

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK
REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang..... ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame.
KEDUA : Pengurangan Ketetapan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD.....

Nama Wajib Pajak / Penanggung
Pajak :
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan dengan : Rp.
jumlah

Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH
Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Nomor :
TENTANG
PENOLAKAN PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan /atau kenaikan Pajak Reklame yang terutang

Nomor

Tanggal

Atas Nama

Alamat

NPWPD :

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Reklame.
- KEDUA :** Surat Permohonan Mengurangkan atau Menghapuskan Sanksi Administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan Pajak Reklame yang terutang (SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD*) Nomor

Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD.....

Berhubung
.....

- KETIGA : Mematuhi pembayaran sesuai dengan Surat Ketetapan yang telah diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian atas
Kelebihan Pembayaran Pajak
Daerah

Bandung,

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan Daerah
Kota Bandung
di

BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama wajib :
pajak/penanggung pajak

Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama / Merk Usaha :

NPWPD :

Alamat :

.....

..... Telp

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah atas;

1. Perhitungan dari wajib pajak;
2. Keputusan Keberatan atau Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
3. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
4. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

No

Bulan Tahun.....

Jumlah Rp.....

Dengan alasan

.....

.....

Demikian atas persetujuannya, disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Wajib Pajak/Penanggung Pajak

(.....)



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Nomor :

TENTANG
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME

Menimbang : Surat Permohonan Pengembalian atas kelebihan Pembayaran Pajak Reklame yang terutang
Nomor
Tanggal
Atas Nama
Alamat
NPWPD :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun tentang ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame.
KEDUA : Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Reklame yang terutang berdasarkan (SKPD/SKPDKB/SKPKDBT/STPD*)
Nomor
Nama/Merk Usaha
Alamat
NPWPD

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :
Semula Ditetapkan : Rp.
Dikurangi dengan jumlah : Rp.
Besarnya Ketetapan : Rp.

Dengan huruf
.....

- KETIGA : Pembayaran atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana diktum KEDUA dilaksanakan dengan menerbitkan SKPDLB.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
BADAN PENDAPATAN DAEAH

Jl. Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4235052 Bandung

SURAT USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Nomor
TENTANG
USULAN/REKOMENDASI PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK REKLAME

Menunjuk Peraturan Wali Kota No..... Tahun tentang , maka dengan ini disampaikan Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak untuk dipergunakan sebagai pengantar Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Pajak Kepada Wali Kota Bandung sebagai berikut :

1. Jenis Pajak :
(diisi jenis pajak yang dihapuskan)
2. Tahun Pajak :
Tahun Buku (diisi tahun pajak yang dihapuskan)
3. No. Urut :
(diisi nomor urut Daftar Pengantar Penghapusan Piutang Pajak)
4. Banyaknya :
5. Jumlah Penghapusan :
6. Jumlah sampai sekarang :
(diisi jumlah pajak yang dihapuskan terdahulu ditambah jumlah pajak yang dihapuskan sekarang)

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG

.....
NIP.



WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTABANDUNG
Nomor:
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan penatausahaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdapat piutang pajak Tahun Pajak sampai dengan Tahun Pajak, yang tidak dapat ditagih lagi;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha piutang pajak yang baik, perlu menghapuskan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota No. Tahun tentang
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi pada Badan Pendapatan Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - 3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor Tahun..... tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menghapuskan piutang pajak Tahun Pajak Sampai dengan Tahun Pajak Pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp. (.....) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Wali Kota Bandung menetapkan rincian dan besarnya penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Plt. WALI KOTA BANDUNG

TTD.

YANA MULYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP.19760604 200604 1 002